

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Terhadap

- 1. Rancangan Qanun Aceh tentang pengelolaan Keuangan Aceh**
 - 2. Rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan.**
 - 3. Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.**
-

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin,

Yth. Sdr. Gubernur Aceh

Yth. Sdr.Pimpinan, dan Anggota DPR Aceh

Yth. Sdr. Para Asisten, Para Kepala Dinas, Kanwil, Kepala Badan, Ketua Lembaga Daerah, para insan pers,

Hadirin dan Hadirat sekalian.

I. Pendahuluan

Mengawali pendapat akhir ini saya mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang

telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan serta kedamaian dalam hati kita masing-masing untuk hadir bersama-sama dalam ruangan yang berbahagia ini.

Begitu pula kita selalu menyampaikan salawat dan salam yang kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Akhir Zaman, pembawa Agama Rahmatan Lil 'Alamin, beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya sekalian.

Saudara Gubernur dan Sidang Dewan Yang Terhormat.

Sungguh tidak terasa, bahwa umur kita sudah berkurang satu tahun dengan memasuki tahun baru Masehi dan sekaligus tahun baru Hijrah. Bagi umat Islam, pada saat ini kita sedang berada dalam Bulan Muharram, bulan dimana kita tidak boleh berperang, bulan tidak boleh bertengkar, bulan tidak boleh berselisih paham yang dapat merusak kesatuan dan persatuan diantara kita, manifestasi untuk langgengnya perdamaian yang telah terbina selama ini.

Disamping itu memasuki tahun 2008, seharusnya tahun membumikan APBA 2008, tapi kita masih disibukkan oleh meletakkan legalitas terhadap penyusunan RAPBA 2008.

Bagi Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar, tahun 2008 merupakan tahun harapan sekaligus tahun Tantangan.

Tahun harapan, mengandung makna:

- Harapan akan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun 2007, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak yang pada gilirannya akan mempunyai dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan;
- Harapan agar kelanggengan perdamaian dapat terus dipupuk dan dipelihara, yang akan mempunyai pengaruh positif terhadap terjaminnya stabilitas. Adanya jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, merupakan modal dasar bagi berlanjutnya pembangunan Aceh;
- Harapan agar ada keadilan dan kesempatan berusaha bagi para pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya, sehingga terjaminnya pemerataan pendapatan bagi masyarakat;
- Harapan agar meningkatnya penegakan hukum, sehingga ada keadilan hukum dalam masyarakat; dan
- Harapan agar lebih tegaknya etika dan moral yang didukung oleh meningkatnya kegiatan Syariat Islam dalam masyarakat sehingga

dapat mencegah kepada tindakan-tindakan yang bersifat moral hazard.

Kami katakan tahun tantangan, karena tahun 2008 adalah tahun persiapan Pemilu 2009. Partai-partai politik, baik lokal maupun nasional akan melakukan segala macam persiapan untuk menghadapi pesta besar itu. Ditambah lagi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Anggota DPD mewakili Aceh. Persiapan-persiapan yang dilakukan masing-masing kontestan pasti akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan, perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam, sehingga dapat mengganggu suasana damai yang sedang kita rajut. Merupakan tantangan bagi kita untuk melihat benturan dan perbedaan itu dalam warna-warni rajutan perdamaian.

Disamping itu pula tahun 2008 adalah tahun untuk pertama kali kita mendapatkan kenaikan penerimaan APBA yang sungguh luar biasa, lebih dari dua kali APBA 2007. Besarnya dana yang kita peroleh ini merupakan tantangan bagi kita untuk dapat memanfaatkan dana tersebut tepat sasaran sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang ada.

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan Ketua dan Anggota Komisi C dan Pansus XI yang sudah berusaha sekeras-kerasnya tanpa mengenal lelah untuk membahas secara mendetil ketiga rancangan Qanun tersebut, biarpun Naskah Rancangan Qanun tentang penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan tidak diteruskan pembahasannya dan dikembalikan kepada eksekutif untuk mendapat penyempurnaan.

Dan tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pendapat dan sarannya dalam menanggapi laporan Komisi C dan Pansus XI tersebut.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum sampai pada Pendapat Akhir Fraksi, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Golkar untuk menanggapi, dan menyampaikan beberapa

pendapat, usul dan saran terhadap Naskah Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, dan Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh Komisi C dan Pansus XI dalam sidang Paripurna pada tanggal 3 Januari 2008 dan tanggal 8 Januari 2008.

Hadirin sidang Dewan yang Terhormat,

II. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, yang setelah melalui proses pembahasan Komisi C, bertambah menjadi 27 Bab, 300 pasal dari sebelumnya 16 bab, 159 pasal. Adapun materi Rancangan Qanun ini terdiri dari Ketentuan Umum, Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah, Azas Umum dan Struktur APBA, Penyusunan Rancangan APBA, Penetapan APBA, Pelaksanaan APBA, Perubahan APBA, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Aceh, Akutansi Keuangan Aceh, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Aceh, Penyelesaian Kerugian Aceh, Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Aceh, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Setelah mempelajari materi, tatacara pembentukan Qanun secara seksama maka Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Rancangan Qanun tersebut layak ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

III. Rancangan Qanun Aceh tentang Penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan.

Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa dalam rangka mempermudah pihak eksekutif menyempurnakan rancangan Qanun tentang penyediaan dan Pengelolaan Dana Cadangan, alangkah lebih sinergis dan sinkronnya bila eksekutif menggunakan contoh draft yang disampaikan oleh komisi C untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan selanjutnya. Sehingga pada akhirnya tanpa mengesampingkan percepatan pembangunan ekonomi dan pengelolaan keuangan Aceh yang akuntabel serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, Fraksi kami Fraksi Partai Golkar berpendapat agar ditunda sementara pembahasannya dan dapat kita jadikan sebagai prioritas program legislasi Aceh tahun 2008 ini.

IV. Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Rancangan Qanun Aceh yang dilaporkan oleh Pansus XI terdiri dari 9 Bab, dan 19 pasal yang memuat tentang Ketentuan umum, Tambahan dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi, Dana Otonomi Khusus, Tim Koordinasi, Kepemilikan Kekayaan/Aset, Pengawasan dan Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Untuk kesempurnaan Rancangan Qanun tersebut, Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Pada ketentuan umum, harap dapat dipertimbangkan untuk ditambah.

Ketentuan mengenai: *Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen*

Perencanaan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) Tahun. Dengan penambahan ini, maka Ketentuan umum Rencana Kerja Pemerintah Aceh pada angka 12 tidak lagi meliputi Kabupaten/Kota, sehingga angka 12 tersebut berbunyi: Rencana Kerja Pemerintah Aceh, yang selanjutnya disebut RKPA adalah dokumen.

Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun.

2. Ada kata penghubung yang sangat mengganggu makna, pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: *Dana yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dan** diatur lebih lanjut dalam Qanun Pendidikan.* Kata penghubung **dan** sesudah bunyi ayat (1) harus dihilangkan sehingga pasal 4 ayat (2) berbunyi: *Dana yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Qanun Pendidikan.*
3. Ada objek yang tidak jelas pada penyebutan Kabupaten/Kota pada ayat (2) dan (3) pasal 7. Untuk itu kami mengusulkan agar ditambah satu kata **Pemerintah** sebelum Kabupaten/Kota, sehingga menjadi *Pemerintah Kabupaten/Kota* dan seterusnya.
4. Karena pemanfaatan dana otonomi sudah diarahkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus yaitu program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sebagaimana telah disebutkan pada

pasal 10 ayat (1), maka kami mengusulkan ada penambahan rujukan kepada ayat ini terhadap bunyi huruf a dan b ayat (1) pasal 11 sebagai penegasan, sehingga huruf a ayat (1) pasal 11 berbunyi: *a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana tersebut dalam ayat(1) pada pasal 10;* Demikian juga huruf b ayat (1) pasal 11 berbunyi: *b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada pasal 10;*

Sehubungan dengan jawaban / penjelasan Gubernur Aceh atas laporan komisi C dan Laporan Panitia khusus XI tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang rancangan Qanun Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada point 9 terkait dengan pasal 5 ayat (2), menurut hemat kami tetap diperlukan tetapi cukup dengan persetujuan Pimpinan DPRA, begitu juga dengan pasal 11 ayat (6).

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

V. Pemanfaatan dana tambahan Migas dan dana Otonomi Khusus.

Secara filosofi bunyi pasal-pasal pada UU no 11 2006 tentang pemerintahan Aceh mengenai tambahan dana bagi hasil Migas dan dana otonomi khusus mengandung makna yang sangat mendalam, yang menurut pemikiran kami dana itu didapatkan melalui perjuangan yang panjang untuk mengejar pembangunan Aceh yang jauh tertinggal, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang paling potensial dihadapi, antara lain angka kemiskinan yang masih tinggi seperti yang dilaporkan oleh Pansus XI dalam sidang paripurna tanggal 8 Januari 2008. Kalau kita kita tidak mampu mengelola dana ini secara baik dan benar, secara transparan dan akuntabel, secara efektif dan efisien, maka yakinlah bahwa masalah kesenjangan social yang kita alami selama ini akan terulang kembali pada masa yang akan datang, mungkin akan lebih dahsyat. Oleh karena itu kami mengharapkan agar seluruh badan pengawas, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat mengontrol dan mengawasi pemanfaatan dana ini agar tepat sasaran.

Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar meminta kepada saudara Gubernur agar dana tersebut, baik yang menjadi alokasi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota hendaklah dimanfaatkan sebesar-besarnya sesuai kewenangan masing-masing untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menunjang tumbuhnya ekonomi kerakyatan disertai upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin dan sebagai tambahan dana bagi penyelesaian masalah-masalah social yang belum selesai akibat konflik dan tsunami serta penyelesaian masalah-masalah pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Salah Satu sasaran utama pemanfaatan dana Tambahan Minyak dan Gas Bumi serta dana otonomi Khusus ini diarahkan kepada upaya-upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Seperti sudah kami sampaikan berkali-kali sebelumnya, bahwa upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran sudah merupakan kesepakatan global dan nasional, untuk memberikan prioritas yang tinggi bagi

program-program tersebut. Menurut data-data yang sudah pernah kami sampaikan dalam sidang paripurna terdahulu, bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh masih relatif tinggi mencapai 34,9% atau sejumlah 1.409.778 jiwa dari jumlah penduduk 4.031.589 jiwa. Bahkan menurut dokumen lain menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi sebesar 1.927.099 jiwa atau 47,8%. Kalau memakai ukuran pendapatan dibawah 2 US\$ perhari, seperti yang ditetapkan dalam format MDGs, maka jumlah penduduk miskin di Aceh akan meningkat tajam menjadi 54 %, yang mendiami pada lebih kurang 2000 desa, baik desa tani atau desa pantai. Kelompok-kelompok desa tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan, yang pada umumnya menggeluti pekerjaannya sebagai petani dan nelayan tradisional. Kedudukan angka kemiskinan Aceh berada pada peringkat yang lebih tinggi 2 atau tiga kali angka kemiskinan tingkat Nasional. Kita menjadi sangat prihatin terhadap besarnya angka kemiskinan dikalangan penduduk Aceh, suatu angka yang menunjukkan kepada kita bahwa ada suatu masalah besar yang sedang kita hadapi saat ini, yang kalau tidak diselesaikan akan mempunyai dampak sangat besar terhadap masalah-masalah politik, keamanan, sosial dan ekonomi. Walaupun berbagai upaya yang menurut persepsi kita sudah berada pada jalan yang benar untuk

mengatasinya, tetapi angka kemiskinan tetap tidak berubah. Yang anehnya lagi hampir 25 triliun rupiah dana turun ke Aceh dalam 2 tahun terakhir dari berbagai sumber, yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan, tetapi tidak mampu menurunkan jumlah orang miskin di Aceh. Didalam naskah Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009 pada Bab Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. baik perempuan maupun laki-laki.

Demikian juga halnya dengan pengangguran, tercatat 220,241 orang pada tahun 2005, dan sampai Maret 2006 tercatat 116.867 orang pencari kerja, hampir 9000 orang diantaranya adalah berpendidikan tingkat sajana dan sarjana muda dan sebagian besar adalah bukan tenaga skill. Seperti halnya dengan kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi disuatu daerah mempunyai dampak negatif yang luar biasa terhadap masalah politik, ekonomi, keamanan dan berbagai ragam masalah sosial.

Oleh karena itu, Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar tetap meminta kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, agar dana **pemaafan** ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan mengatasi pengangguran melalui program-program yang konkrit dan terarah yang antara lain sebagaimana kami kemukakan dibawah ini. Usul program ini, kami sampaikan lebih awal, sehingga ada kesempatan untuk dimasukkan didalam penyusunan PPAS 2008 yang akan datang.

Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.

Dana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota haruslah diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan desa, jembatan, saluran irigasi (tersier), pusat-pusat perdagangan tradisional serta pemanfaatan lahan-lahan terlantar. Dana yang menjadi alokasi Pemerintah Aceh, hendaklah dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung program pembangunan kabupaten/kota.

Kalau kita pelajari dengan cermat laporan masyarakat, masih banyak kabupaten/kota yang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan belum memadai, dan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Hasil pemeliharaan dan pembangunan yang dilakukan selama ini, kualitasnya sangat jelek, sehingga masa pakai sangat singkat dibandingkan dengan masa kerusakannya. Hal ini disebabkan antara lain: alokasi dana kabupaten/kota yang kecil, standarisasi yang rendah dan disinyalir adanya factor KKN yang ikut berperan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai di tingkat wilayah pedesaan akan memberikan motivasi bagi masyarakat pedesaan untuk menggali potensi yang dimiliki desa dalam meningkatkan produksinya. Oleh karena itu Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kepada saudara Gubernur untuk dengan sungguh-sungguh mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan pedesaan di daerahnya masing-masing, dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Perkebunan Rakyat.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam pengembangan perkebunan rakyat, antara lain dapat kami kemukakan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi usaha-usaha rehabilitasi perkebunan rakyat, melalui pemberian kredit lunak dan mudah memperoleh nya.

Pada saat ini banyak kebun rakyat yang rusak atau tidak terpelihara seperti kebun karet, kopi, coklat, sawit, dan lain-lain karena ditinggalkan pemiliknya pada waktu konflik ataupun pemiliknya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya atau meninggal akibat tsunami. Memang

ada perbaikan yang dilakukan BRR, NGO atau sumber dana lain, tetapi pada pengamatan kami belum mampu menjangkau perbaikan seluruh kebun yang rusak tersebut.

Beberapa kali Fraksi kami Fraksi Partai Golkar, telah menyampaikan dalam sidang-sidang terdahulu, agar adanya bantuan untuk perbaikan perkebunan tersebut, tetapi belum mendapat tanggapan yang serius dari dinas terkait khususnya dan eksekutif umumnya. Untuk itu Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar sekali lagi mengingatkan eksekutif untuk memberikan pinjaman lunak bagi perbaikan kebun terlantar tersebut. Kalau usaha ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan memberi dampak yang positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat di pedesaan.

- 2. Mendorong tumbuhnya perkebunan yang diusahakan rakyat melalui pemberian bantuan bibit komoditas tanaman yang mempunyai nilai kompetitif tinggi seperti sawit, cokelat dan karet, dan lain-lain yang pembibitan dan penyalurannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.*

2.1 Pemanfaatan Lahan Desa yang Terlantar.

Kalau ditelusuri desa-desa diseluruh Aceh, maka kita akan mendapat kesan, banyaknya tanah-tanah didesa yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, padahal lahan tersebut sangat produktif. Eksekutif perlu kerja keras untuk untuk melakukan mapping terhadap lahan-lahan tidur yang berada dikawasan pedesaan , sehingga didapat data yang akurat bahwa lahan yang mana, cocok untuk tanaman apa. Kepada petani pemilik lahan itu dapat diberikan bantuan bibit-bibit tanaman yang sesuai, melalui kelompok-kelompok tani yang dibentuk untuk itu. Bibit tanaman yang diberikan, hendaklah bibit yang terjamin kualitasnya, dan sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa alokasi dana untuk pengadaan bibit tersebut, berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Kalau kegiatan ini berhasil dilaksanakan, maka akan mempunyai nilai tambah yang sangat bermakna bagi peningkatan pendapatan petani,

Oleh karena itu, Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Gubernur untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan alokasi dana untuk pengadaan bibit tanaman sesuai

dengan kebutuhannya dalam naskah kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.2. Perkebunan Inti.

Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya perkebunan-perkebunan inti dengan tanaman yang mempunyai nilai kompetitif tinggi, dengan melibatkan rakyat secara aktif, melalui pemberian lahan yang ditanami seluas 4 hektar. Dalam setiap areal perkebunan tersebut tersedia jalan-jalan penghubung, perumahan untuk petani kebun, fasilitas-umum seperti, sekolah, tempat ibadah, listrik, air bersih, pasar dan pabrik pengolahan. Untuk membiayai usaha ini dapat diperoleh melalui pemberian kredit sangat lunak dari lembaga keuangan baik bank ataupun non bank dan pembangunannya ditunjuk Badan-badan yang memang ekspert dibidangnya. Rekrutment petani yang kelak akan mendapatkan hak untuk mengelola bagian kebunnya, harus dilakukan secara adil transparan, dan merata dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin.

Model pembangunan perkebunan inti seperti ini sudah pernah diterapkan di Aceh, yaitu Perkebunan Inti didaerah Alue Ie Mirah Aceh Timur seluas 9000 Ha kebun karet yang dibagikan kepada 4500 KK

petani, sehingga tiap petani mendapat 2 Ha. Tetapi kebun karet tersebut ditinggalkan petani, akibat konflik yang berkepanjangan, dan sekarang petani sudah kembali menggarap kebun yang rusak itu.

Untuk itu Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, sangat mendukung program Gubernur untuk membuka lagi perkebunan plasma yang dibagi-bagikan bagi petani plasma melalui usaha pemberian kredit lunak.

Pertanian tanaman Pangan (padi) dan efektivitas pabrik padi rakyat.

Mendorong peningkatan produksi padi per hektar dari rata-rata hanya 4 ton menjadi lebih optimal disamping mengaktifkan kembali sekitar 700 pabrik-pabrik padi rakyat yang tidak lagi beroperasi selama ini

Upaya peningkatan produksi padi.

Menurut data yang terdapat pada buku “Aceh dalam Angka” 2005, luas panen padi diseluruh Aceh adalah 337.893 hektar dengan jumlah produksi 1.411.649 ton, sehingga produktivitas hanya mencapai 4,17 ton per hektar. Menurut pendapat kami angka produktivitas hasil panen padi petani masih sangat rendah, dan masih sangat mungkin untuk

ditingkatkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil panen padi akan dapat mendorong peningkatan pendapatan petani.

Oleh karena itu Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kepada Gubernur agar membuat kesepakatan dengan Bupati dan Walikota yang masih mempunyai lahan pertanian didaerahnya untuk menyusun program yang jelas dalam rangka peningkatan produksi hasil panen padi.

Mengefektifkan kembali pabrik padi rakyat.

Selanjutnya menurut laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, jumlah pabrik padi rakyat di Aceh adalah 1287 buah, dengan kapasitas giling mendekati 2,2 juta ton pertahun. Dilaporkan juga, dari produksi padi sekitar 1,4 juta ton per tahun, hanya 500.000 ton yang digiling oleh pabrik padi rakyat, selebihnya 900.000 padi giling dibawa keluar Aceh, yang berarti 75 % pabrik padi rakyat di Aceh menganggur. Kalau pabrik padi rakyat ini dapat berproduksi kembali, maka kondisi ini, merupakan daya ungkit bagi pendapatan petani.

Karena itu, Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur, untuk berusaha mengefektifkan kembali pabrik padi rakyat, sekitar 700 buah yang sebagian besar tidak berproduksi.

Perikanan.

Pada saat ini ada beberapa kawasan pendaratan ikan yang sudah mulai tumbuh yaitu kawasan Idi, Kawasan Lam Pulo, kawasan Peudada dipantai Timur dan diharapkan akan tumbuh kawasan-kawasan serupa di Pantai Barat Aceh seperti di Calang, Meulaboh, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Simeulu. Diharapkan bahwa kawasan-kawasan perikanan ini akan tumbuh dan berkembang menjadi kawasan industri perikanan terpadu.

Di kawasan tersebut pada saat ini sedang dan akan berkembang fasilitas-fasilitas Pembuatan dan pemeliharaan kapal-kapal ikan, tempat pengeringan dan pengalengan ikan, perumahan nelayan, pabrik es, cold storage, penyediaan air bersih dan listerik, depo BBM, tempat pelelangan ikan, lembaga keuangan dan fasilitas lain yang di butuhkan nelayan.

Untuk itu, Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kepada Saudara Gubernur untuk dapat mengembangkan kawasan industri perikanan terpadu, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Memanfaatkan Hutan Tanpa Merusak Hutan.

Hutan merupakan mata rantai ekosistem yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hutan dapat berfungsi sebagai oksigen supply bagi manusia, penyimpan air yang cukup banyak pada waktu musim kering dan hujan, juga dapat mengontrol hama untuk tanaman disamping penyediaan bahan baku untuk obat-obatan, serta mampu menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan lingkungan. Kami mendapat kesan, bahwa kalau hutan mampu dikelola dengan baik, maka hasil hutan merupakan salah satu unsur yang dapat merupakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi, dan mampu memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, terutama didalam Program pengentasan kemiskinan. Aceh mempunyai luas hutan sekitar 3,3 juta ha, 62 % dari luas daratan 5,7 juta ha, 2,7 juta diantaranya adalah hutan lindung yang merupakan suaka alam dan objek wisata alam, termasuk didalamnya Taman Nasional Gunung Leuser yang diperkirakan luasnya 1,4 juta ha.

Menurunnya kondisi hutan yang disebabkan oleh laju deforestation yang tinggi, mengakibatkan tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, kerusakan DAS yang meningkat, rusaknya habitat ekosistem akibat deforestation hutan mangrove.

Laju deforestation yang tinggi disebabkan oleh sistem pengelolaan hutan yang belum optimal dilakukan, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan penyeludupan kayu, rendahnya kapasitas pengelolaan hutan.

Hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai system kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar dari nilai produk kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7 % dari total ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat khususnya untuk air minum, wisata alam, objek penelitian dan sebagainya.

Sayangnya sampai saat ini sistem pemanfaatannya belum berkembang secara maksimal.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Saudara Gubernur yang telah menghentikan sementara penebangan hutan secara resmi, biarpun secara illegal praktek penebangan liar, terutama di hutan lindung masih saja terjadi.

Oleh karena itu, Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar, dalam rangka memanfaatkan hutan tanpa merusak hutan, mengajukan beberapa pemikiran sebagai berikut:

a. *Mengadakan review terhadap tata ruang Aceh.*

Akibat pemekaran wilayah menjadi Kabupaten/Kota, dan penambahan dan migrasi penduduk banyak lahan harus dikeluarkan dari kawasan hutan Aceh. Presiden telah memberi lampu hijau untuk melepaskan 9 juta ha kawasan hutan diseluruh Indonesia untuk dikonversi menjadi lahan pertanian.

b. *Adanya kesepakatan politik terhadap manajemen hutan Aceh.*

Kesepakatan ini perlu dicapai oleh stake holder yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Aceh, terutama terhadap pengamanan hutan dan pemanfaatan hutan tanpa merusak hutan.

c. Meningkatkan law enforcement terhadap pemeliharaan hutan Aceh.

Kami mendukung usaha-usaha yang dilakukan Gubernur untuk meningkatkan pengamanan hutan dengan meningkatkan jumlah polisi hutan, dengan melatih dan melantik 1000 jawara penjaga hutan, biarpun pada pengamatan kami dilapangan belum efektif. Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar sarana dan prasarana untuk pengawasan hutan harus ditingkatkan seperti peralatan pemadam kebakaran hutan, alat komunikasi transportasi darat dan udara.

d. Memanfaatkan hutan untuk kepentingan rakyat dengan tidak merusak hutan.

- 1). Ada suatu model yang kami tawarkan yaitu: dikawasan hutan lindung, pada lahan penyangga, terutama kawasan hutan lindung yang sudah gundul dapat dimanfaatkan oleh petani hutan. Lahan itu tetap milik Negara, tidak berubah status, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak berlaku untuk agunan bagi pengambilan kredit di Bank. Mereka boleh menguasai tetapi tidak boleh memiliki. Dibuat tanda batas yang jelas dan petani hutan bersama keluarga tidak dibenarkan tinggal dikawasan tersebut, tetapi difalilitasi dengan alat transportasi umum dan prasarana

perhubungan. Didalam kawasan hutan penyangga dapat ditanami tanaman hutan sejenis yang mudah tumbuhnya, tidak berumur relatif panjang yang sekarang mempunyai nilai ekonomi tinggi misalnya tanaman Sentang, nama yang sangat populer bagi orang-orang di pedesaan. Sesudah umur tertentu, tanaman hutan tersebut dapat dipergunakan sebagai penyangga tanaman yang menjalar seperti rotan, jenar atau lada dan sebagai tanaman sela dapat ditanami kopi atau tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomi. Pada umur tertentu, sesudah tanaman hutan itu mempunyai ukuran diameter yang diizinkan, baru petani dapat menebangnya dan berlaku bagi hasil antara pemerintah dan petani, sedangkan hasil tanaman hortikultura seluruhnya menjadi hak petani yang bersangkutan. Menurut informasi, pada saat ini ada 3000 KK yang tinggal pada Hutan penyangga Leuser, dimana resiko ketidakpastian hukum dan penghidupan mereka cukup tinggi.

- 2). Meningkatkan upaya-upaya, untuk menjadikan hutan lindung sebagai objek wisata, dengan keikutsertaan masyarakat secara aktif didalamnya. Kalau masyarakat setempat diberi kesempatan untuk

mendapat penghasilan dari pengelolaan wisata alam, maka mereka juga dengan sendirinya akan ikut serta menjaga kelestarian hutan.

Hanya untuk mendukung program ini, perlu dipercepat peningkatan sarana jalan dan pengadaan alat transportasi yang memadai terutama jalan lingkar Bireun – Bener Meriah – Takengon - Blang Kejeuren-Kutacane, pada ruas yang lain masih terdapat jalan yang wajib dibuka yaitu: Jalan Pining-Lokop Serba Jadi kemudian Jalan Blang Kejeren-Babahrot serta Jalan Trumon-Bulu Seuma dan tidak kalah pentingnya adalah jalan Geumpang-Meuredu yang belum memenuhi syarat untuk pariwisata dan lebih-lebih untuk jalan poros ekonomi.

e. Menciptakan masyarakat yang cinta kepada kelestarian hutan.

Dalam rangka memberi pengertian kepada masyarakat bahwa hutan adalah sebagian dari pada kehidupan mereka, perlu peningkatan gerakan-gerakan cinta hutan untuk seluruh masyarakat seperti beberapa upaya yang sudah dilakukan selama ini, memperbanyak ceramah-ceramah, khutbah Jum'at, memperbanyak penyebaran leaflet, yang isi pesannya mengenai kecintaan terhadap hutan yang lestari. Tetapi yang paling penting adalah program-program jangka panjang misalnya

penambahan atau penyesuaian kurikulum sekolah, memberi dukungan terhadap munculnya kelompok-kelompok pencipta alam, memfasilitasi usaha-usaha masyarakat yang mengelola pariwisata alam. Disamping itu prasarana dan sarana jalan dan perhubungan merupakan program pendukung yang harus mendapat perhatian.

Penyelesaian Masalah-Masalah Sosial.

Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, mendorong Gubernur untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan, antara lain penyediaan rumah bagi kaum dhuafa dan korban konflik, bantuan langsung terhadap anak yatim piatu korban konflik dan tsunami, pemberian dana diyat yang belum selesai.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pembangunan Pendidikan yang bermutu dan merata.

Dana untuk sektor pendidikan dialokasikan untuk mempercepat penyelesaian program pendidikan sembilan tahun, dan bantuan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekitar 600 dayah, 4000 TPA,

serta peningkatan bantuan terhadap Balai Seumeubeut. Karena anak didik pada umumnya bertempat tinggal jauh dari sekolahnya perlu ada transportasi rutin kesekolah.

Insentif Tenaga Pendidik.

Seiring dengan keinginan kita semua bahwa mutu pendidikan pada semua tingkatan dari waktu ke waktu secara bertahap harus ditingkatkan, dan berbicara tentang mutu berkaitan dengan kualitas pengajar dan pendidik secara langsung, oleh karenanya Fraksi Kami Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Gubernur untuk mengalokasikan sejumlah anggaran yang diperuntukkan bagi insentif para tenaga pengajar dengan mempertimbangkan kualifikasi, klasifikasi dan beban tugas. Sementara nominal dari insentif dimaksud diharapkan dapat dipenuhi secara bersama antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendekatan secara proporsional. Lebih dari itu besarannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBA dan APBK.

Tenaga pengajar yang kami maksudkan haruslah menjangkau semua strata penugasan mulai dari SD, MI, Mts, SMP, SMA, MA, dan berikutnya jenjang pendidikan S1, S2, S3, dan Guru besar.

Wajib belajar 9 tahun.

Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan SDM yang menguasai IPTEK serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan Aceh pada masa yang akan datang.

Program pendidikan 9 tahun, harus sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2008 ini, tetapi pada pengamatan kami, biarpun program pendidikan 9 tahun yang dilaksanakan sekarang sudah melampaui target nasional, maka kami mengusulkan kepada Saudara Gubernur untuk mempercepat program pendidikan 9 tahun. Dengan pelaksanaan program ini, maka semua fasilitas yang dibutuhkan menjadi beban Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kutipan-kutipan dari anak didik. Malah bagi anak didik yang orang tuanya tidak mampu, mendapat bantuan-bantuan khusus. Karena banyak anak didik yang berada di desa-desa tani dan nelayan, tempat tinggalnya jauh dari sekolah, disediakan bus dan boat sekolah, yang penyediaannya dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi kemudian didistribusikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan biaya operasional bus tersebut. Walaupun program pendidikan 9 tahun ini secara nasional selesai, tetapi program ini belum dilaksanakan didalam satu atap, artinya manajemen SD dan SMP di merger dengan lokasi pada satu kompleks. Karena kompleks yang kami sebutkan diatas belum tersedia di Aceh, maka kami mengusulkan agar tiap Kabupaten dan Kota direncanakan ada satu kompleks percontohan dimana fasilitas untuk SD dan SMP disatukan. Kami mengusulkan juga agar kompleks-kompleks percontohan ini ditempatkan pada daerah-daerah terpencil di Kabupaten/Kota tersebut.

Sehubungan dengan hal yang tersebut diatas,Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kepada Gubernur untuk menyepakati berbagai jenis kegiatan-kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga program pendidikan 9 tahun dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan untuk tahun 2008 dapat direncanakan anggarannya untuk satu kompleks percontohan di tiap Kabupaten/Kota termasuk didalamnya pengadaan alat transportasi sekolah bagi anak didik yang tempat tinggal jauh dari sekolahnya.

Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Dayah/Pesantren.

Dayah adalah merupakan suatu lembaga pendidikan yang tertua di Aceh, yang diselenggarakan atas swadaya masyarakat. Menurut Naskah kuno yang tercatat di Spanyol, bahwa Dayah telah eksis di Aceh sejak abad ke 15, Dalam sejarahnya, bahwa para santri yang menuntut ilmu pada Dayah yang berlokasi di daerah Ulee Lheu sekarang, telah pernah memperbaiki kapal dagang Spanyol yang rusak waktu itu. Dari informasi singkat ini dapat disimpulkan bahwa Dayah merupakan lembaga pendidikan swasta yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum yang bersifat praktis, secara proporsional. Pada pengamatan kami eksistensi lembaga pendidikan Dayah pada saat ini, perlu ada peningkatan perhatian dan bantuan pemerintah. Fraksi Kami, Fraksi Partai Golkar, mengusulkan agar bantuan untuk pembangunan Dayah langsung diberikan tunai kepada Tgk. Dayah melalui lembaga keuangan, tidak melalui proyek, seperti selama ini dilaksanakan. Hal lain yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk memperkuat akar aqidah dan membentengi Aceh yang bersyari'at Islam ini dari infiltrasi pemahaman lain sangat dibutuhkan pembangunan pesantren terpadu disemua daerah perbatasan seperti : Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pak-Pak Barat,

Kabupaten Singkil dengan Sibolga, Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo dan Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat. Kondisi terkini dari keempat daerah tersebut sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan dari pengaruh pemahaman aqidah lain.

Sama halnya pada daerah-daerah terpencil dan terisolir amat dibutuhkan pembangunan dayah-dayah yang selama ini belum berkembang secara baik.

Bantuan untuk TPA dan Balai Seumeubeut

Sangat ironi, bahkan sangat memalukan, dimana banyak tokoh-tokoh Aceh yang menjadi pemimpin di Aceh, tidak mampu membaca Al Quran. Hal yang mengejutkan ini terjadi pada waktu diadakan uji baca Al Quran, sebagai syarat menjadi calon Gubernur atau calon Bupati/ Walikota. Banyak calon yang berguguran, karena hanya tidak bisa baca Al Quran. Kalau kondisi ini kita letakkan dalam fenomena Gunung Es, maka sebahagian masyarakat Aceh tidak mampu membaca Al Quran. Keadaan yang memprihatinkan ini bisa terjadi, karena sejak kecil, anak-anak usia dini tidak diajarkan membaca Al Quran, seperti yang diperintahkan oleh agama. Proses pembelajaran baca Al Quran usia dini di Aceh yang dilakukan menurut metode Iqra' atau metode tradisional dilaksanakan

secara swadaya masyarakat pada TPA-TPA dan Balai-Balai Seumeubeut. Pada pengamatan kami, fasilitas-fasilitas dan kapasitas yang tersedia pada institusi tersebut sangat minim, masih memerlukan uluran tangan Pemerintah.

Untuk menghindari kejadian yang memalukan itu, Fraksi Partai Golkar, mendesak Gubernur, untuk mencantumkan tambahan dana yang bermakna bagi 4000 TPA dan Balai Seumeubeut dalam naskah PPAS tahun 2008.

Da'i Perbatasan.

Berkaitan dengan pengawalan aqidah dan antisipasi terhadap banyaknya pengaruh keyakinan lain selain dari Islam, Pemerintah Aceh dapat kembali memperhatikan perkembangan tersebut melalui pendekatan pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini menciptakan Da'i yang tangguh dan handal, mempunyai skill dalam bidangnya lebih dari itu yang mau dan mampu untuk menetap di wilayah-wilayah perbatasan dan juga tidak berorientasi kepada kehendak untuk menjadi pegawai negeri sipil dan hal ini dapat berjalan dengan baik tentunya didekati dengan penyediaan insentif yang cukup dan memadai.

Peningkatan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang sangat mendasar dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di Aceh, perlu dibangun rumah bidan pada hampir 4000 desa, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Rumah yang dibangun harus layak huni yang di fasilitasi dengan tempat kerja dan diletakkan pada tempat yang strategis didesa. Bidan-bidan harus denitif berada didesa, tidak seperti selama ini banyak bidan yang ditugaskan tidak berada didesa, karena berbagai alasan, antara lain perumahan yang disediakan tidak memenuhi syarat. Disamping itu bidan harus melaksanakan tugas yang multi purpose, tidak hanya memberi pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, tetapi juga tugas lain yang tak kalah penting dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, antara lain kewaspadaan dini terhadap gizi Balita, pengobatan sederhana, pengawasan terhadap munculnya penyakit menular, penyampaian informasi kesehatan. Bahkan dana ini dapat dipergunakan untuk

untuk menjaga dan memelihara derajat kesehatan anak sekolah dasar yang merupakan generasi penerus bangsa. Adapun kegiatannya dapat dilakukan melalui intensifikasi upaya kesehatan sekolah melalui program pembangunan 3000 rumah perawat di sekolah dasar dan MIN, menempatkan seorang perawat kesehatan pada tiap sekolah tersebut yang bertugas mengawasi tingkat gizi anak sekolah, mengawasi lingkungan sekolah yang sehat, mendeteksi dini dan mencegah terjadinya penyakit menular di sekolah, mengkoordinir pemeriksaan gigi dan mulut serta upaya pengobatan sederhana.

Untuk itu fraksi kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kepada saudara Gubernur, untuk mendorong Bupati/Walikota memasukkan program ini dalam naskah kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin dan Hadirat Yang Berbahagia,

Pemberdayaan Kaum Perempuan.

Sudah menjadi tekad dan telah pula dijabarkan dalam bentuk ketentuan dan perundang-undangan bahwa kaum perempuan telah diberikan kesempatan untuk berperan aktif baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, untuk itu kualitas kaum perempuan dalam berbagai bentuk organisasi masih harus ditingkatkan, sebagai konsekuensinya amat logis manakala kaum perempuan harus ditunjang dengan berbagai kebijakan berupa program peningkatan melalui pembinaan secara langsung, pendidikan dan latihan. Karenanya Fraksi kami Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Gubernur untuk dapat mengalokasikan anggaran yang cukup dan memadai, apakah melalui program/kegiatan ataupun bersifat bantuan pelatihan, yang terpenting adalah anggaran dimaksud mampu membiayai kegiatan seperti yang kami sampaikan diatas.

Fraksi kami Fraksi Partai Golkar mendukung upaya-upaya eksekutif didalam pemberdayaan perempuan Aceh, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bantuan Untuk PMI, Pramuka, KNPI, OKP, dan Badan Narkotika Provinsi.

Terhadap organisasi kemanusiaan, pembinaan generasi muda dan organisasi perlindungan terhadap masa depan bangsa perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Aceh. Karenanya, Fraksi kami Fraksi Partai Golkar berharap banyak kepada Saudara Gubernur untuk dapat mengalokasikan sejumlah anggaran yang mampu menunjang kegiatan dari unit organisasi diatas.

VI. Ibu Kota Aceh.

Banda Aceh merupakan ibukota Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera merupakan kota yang sangat strategis ditinjau dari posisinya dalam kaitan dengan kota-kota besar Negara-negara tetangga, sehingga dapat memberikan peranan penting dalam perdagangan antar Negara.

Disamping itu juga dilihat dari sejarah perkembangan Banda Aceh juga merupakan pusat budaya, pendidikan, pariwisata, serta pusat pemerintahan.

Yang paling penting adalah bahwa Banda Aceh merupakan simbol perjuangan rakyat Aceh, dan terakhir Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya kepada umat manusia dengan mengumpulkan rakyat Banda Aceh khususnya menghadap Ilahi yang merupakan titik awal munculnya kesadaran rakyat Aceh untuk tafakur dan mengoreksi diri. Oleh karena itu sudah sewajarnya Banda Aceh kita pertahankan sebagai ibu kota Aceh. Sejalan dengan hal tersebut dalam mengembangkan ibu kota Aceh sebagai kota yang dapat menjalankan fungsi-fungsi kota sebagaimana kami sebutkan diatas, diperlukan perluasan wilayah, sehingga mampu menampung seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai ibu kota Aceh yang layak dan representatif.

Untuk maksud tersebut Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Saudara Gubernur untuk menindaklanjuti hal melalui perencanaan yang komprehensif serta penyediaan dana yang memadai, sehingga ibu kota Aceh yang kita idam-idamkan dapat menjadi kenyataan.

VII. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi lepas pantai (Off Shore).

Pantai Aceh yang memiliki lautan yang sangat luas dengan potensi hasil tambang minyak dan gas bumi yang belum terdeteksi secara baik, tentu merupakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana di amanahkan dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 156 ayat 1,2,3.

Disamping itu juga kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai yang dilaksanakan oleh BP Migas seperti Blok EAO (East Aceh Off shore) terus berjalan tanpa kita ketahui jumlah dan potensinya.

Untuk itu Fraksi Kami Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada eksekutif untuk mempelajari / meneliti potensi minyak gas bumi yang ada dalam kewenangan Aceh dan mendata seluruh kegiatan pertambangan lepas pantai yang ditangani BP Migas di perairan Aceh.

VIII. Rencana Kerja Sama Investasi.

Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Gubernur atas upayanya mengundang para investor dari luar negeri untuk menanamkan investasinya di Aceh, karena diyakini dengan banyaknya investasi yang masuk akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui serapan tenaga kerja maupun multi player efek lainnya, hanya saja kami juga ingin mengingatkan Saudara Gubernur bahwa menilik begitu banyak sudah M O U ditandatangani dengan pihak asing pada periode pemerintahan yang lalu dan periode sekarang, yang pada akhirnya tidak satupun yang berhasil direalisasikan. Untuk itu kiranya Saudara Gubernur dapat mengikstrusikan kepada instansi yang terlibat langsung dalam hal kerja sama luar negeri ini segera menindaklanjuti hasil upaya Saudara Gubernur, yang segera disampaikan ke lembaga DPRA untuk mendapatkan persetujuan kerja sama sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tepatnya pada pasal 160 ayat (4).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketersediaan energi listrik, kondisi keamanan yang kondusif, stabil dan berkelanjutan, infrastruktur yang memadai termasuk didalamnya pelabuhan samudera yang berkualifikasi internasional, perlu mendapat perhatian khusus dari Saudara Gubernur, tanpa ini semua para investor yang akan menanamkan investasinya di Aceh akan ragu-ragu.

IX.Asset.

Asset yang merupakan kekayaan yang dimiliki daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga.

Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan barang daerah haruslah tertib administrasi baik dalam penerimaan penyimpanan dan pengeluaran barang.

Sehubungan dengan akan berakhirnya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) awal tahun 2009 mendatang serta diikuti dengan penyerahan asset dari BRR kepada Pemerintah Aceh melalui Pemerintah akan diperlukan persiapan baik personil, maupun sistem.

Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada eksekutif agar pengelolaan barang dilaksanakan melalui administrasi yang baik, tertib, lengkap, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan Neraca Aceh.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

X. Penutup.

Setelah kami mempelajari secara seksama terhadap kedua rancangan Qanun tersebut dan setelah mendengar pendapat dan saran Saudara Gubernur menanggapi laporan Komisi C dan Pansus XI, sampailah kami pada Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Maka setelah dilakukan beberapa penyesuaian seperti yang sudah kami usulkan diatas, sambil menyerahkan diri dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi kami, Fraksi Partai Golkar dapat menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan

